

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang pressindo, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Hukum Kelembagaan Negara kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi, Stengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) Project-UNDP*, Jakarta, 2013.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- Narullah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Program Semi Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2002.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implimentasi*, Sinar Grafika Offset.Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Cetakan ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Makalah Seminar Nasional. Jakarta, 2003.

Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

C. JURNAL dan WEBSITE

Galang Asmara, Jurnal : “Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 19 Nomor 2, Juni 2011.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, pkl. 19.00 WIB.

<http://kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-punglii.html>, diakses pada tanggal 08 Juni 2018, pkl. 01.49 WIB.

<http://www.landasanteori.com>. Diakses pada tanggal 07 Juni 2018, pkl. 21.00 WIB.

<http://www.monitorriau.com/moble/detailberita/1423/pengertian-pungli-serta-faktor-penyebabnya>, diakses pada tanggal 08 Juni 2018, pkl. 01.57 WIB.

<http://www.ombudsman.or.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pkl. 21.00 WIB.

